



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00043/2025
Lampiran : 1 Halaman

22 Januari 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djoghadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan.**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas:

- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

yang akan diselenggarakan pada **19 Februari 2025**. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO dan RUPSU tersebut yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Rabu, 22 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Menteri PKP: Banyak Negara di Timteng Siap Bangun Perumahan di Indonesia

Jakarta, HanTer - Kabar gembira datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, yang menyampaikan bahwa selain Qatar, Uni Emirat Arab dan negara-negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Kata Maruar usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025) ia mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

"Begitu banyak investor yang datang. Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain," ujarnya.

Lanjutnya, Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan

bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam persiapannya, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara, dan Perumnas. "Itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," jelasnya.

Ditambahkan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung investasi di sektor perumahan.

"Sekaligus memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah," sebutnya.

■ Danial

PRESIDEN PRABOWO MINTA SEMUA PEMDA SUKSESKAN TARGET SWASEMBADA PANGAN

Indonesia dengan luas daratan 1,904 juta km persegi yang masih banyak lahan kosong diharapkan mampu diberdayakan.

Jakarta, HanTer - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan juga meminta, agar seluruh pemerintah daerah turut berkontribusi penuh dalam mewujudkan kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

"Swasembada pangan menjadi top prioritas yang harus menjadi visi dan visi kita bersama," kata Zulkifli Hasan pada Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara dikutip Antara, Selasa (21/1/2025).

Lanjutnya, dalam mendukung kebijakan Astacita Presiden Prabowo, maka harus didukung seluruh pemerintah daerah dan me-



MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan

libatkan seluruh pemangku kebijakan terkait.

"Kita harus awasi bersama-sama, tidak mungkin pemerintah pusat saja, begitupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, karena yang mencakup swasembada pangan seluruh pemangku kebijakan terkait," jelasnya.

Selanjutnya dalam ra-

pat yang dihadiri seluruh unsur pemerintah daerah di Sumut ini, Zulkifli Hasan menyampaikan detail perubahan luas lahan baku sawah 2019-2024 untuk 16 provinsi sekitar 7.384.341 hektare atau turun 79.607 hektare dalam lima tahun.

Sedangkan, Zulhasan sapaan akrabnya memaparkan untuk luas lahan baku

sawah menurut ketersediaan irigrasi berdasarkan data November 2024 sekitar 7.384.241 hektare yang terdiri

dalam luas baku daerah irigrasi dan daerah irigrasi rawa 4.727.588 hektare dan luar luas baku daerah irigrasi dan daerah irigrasi rawa sekitar 2.656.753 hektare.

Lalu, tren luas panen,

produksi dan produktivitas berdasarkan data 2024 tercatat 10.05 juta hektare luas panen, 5.24 ton produktivitas dan 52.66 hektare jumlah produksi atau turun jika dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat 10.68 juta hektare luas panen, 5.11 ton produktivitas dan 54.60 produksi.

Sementara untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2025 secara nasional telah ditetapkan sebanyak Rp144,6 triliun dengan rincian anggaran melalui kementerian dan lembaga Rp59,42 triliun.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia karena dengan kolaborasi akan mempermudah untuk mewujudkan program tersebut.

"Kita satu tim yang harus memiliki visi dan misi bersama baru itu bisa sukses. Makanya kami mengadakan rakor ini," tutur Zulhasan.

■ Danial

LKPP: Pengadaan Nasional Dalam 3 Tahun di Atas Rp1.200 Triliun

Tanjungpinang, HanTer - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi menyatakan, nilai pengadaan nasional dalam tiga tahun terakhir selalu berada di atas Rp1.200 triliun.

Menurutnya capaian ini membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah punya peran strategis dalam memajukan perekonomian nasional.

"Dampaknya sangat besar, seperti menciptakan dua juta lapangan kerja melalui belanja produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8 persen," kata Ketua LKPP Hendrar Prihadi dalam kegiatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang,

Kepri, Selasa.

Hendrar juga menjelaskan, keunggulan katalog elektronik versi 6.0, yang mencakup pemilihan produk dan penyedia jasa, transaksi kontraktual, hingga sistem pembayaran yang terintegrasi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa harga di e-katalog bukanlah harga final. Negosiasi harga atau mini kompetisi tetap diperlukan untuk memastikan efisiensi biaya dalam setiap pengadaan barang dan jasa.

Dia turut menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah Kepri dalam mendukung produk dalam negeri dan UMK.

"LKPP siap memberikan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan pemanfaat-

an e-katalog di seluruh wilayah," katanya. Sementara, Ketua Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) Sutardi menjelaskan, katalog elektronik versi 6.0 adalah langkah maju dalam digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Katalog elektronik versi ini memiliki fitur-fitur unggulan, seperti kemudahan dalam pemilihan produk dan jasa, transaksi kontraktual yang efisien, serta sistem pembayaran yang terintegrasi.

"Hal ini menjadi solusi modern untuk kebutuhan pengadaan di berbagai daerah," jelas

Sutardi.

Dia juga menambahkan bahwa pelaksanaan katalog elektronik versi 6.0 bertujuan untuk menciptakan pengadaan yang adaptif dan mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami percaya bahwa sinergi antara pusat dan daerah akan memperkuat implementasi katalog elektronik ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, komitmen Pemprov untuk terus memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui integrasi sistem audit, pengawasan, dan pelaporan secara realtime.

■ Danial

Pengamat: Rupiah Berpotensi Melemah Seiring Penegasan Trump Terkait Tarif Impor

Jakarta, HanTer - Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyatakan, nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi melemah seiring penegasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pidato pelantikan terkait penyesuaian tarif impor untuk negara-negara mitra dagang AS.

"Presiden Trump dalam pidato pelantikannya masih menyebutkan soal penyesuaian tarif impor untuk negara-negara partner dagangnya untuk memperbaiki pendapatan AS. Trump juga menegaskan kenaikan tarif impor 25 persen untuk Meksiko dan Kanada," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (31/1/2025).

Kenaikan tarif ini dianggap bisa memicu aksi balasan dari negara yang bersangkutan dan akhirnya bisa menimbulkan perang dagang. Tarif sebesar 25 persen terhadap barang-barang yang berasal dari Meksiko dan Kanada karena masalah imigrasi ilegal yang

belum terselesaikan serta masuknya obat-obatan terlarang ke AS.

"Rupiah berpotensi melemah hari ini dari penegasan Trump tersebut. Potensi pelemahan ke arah Rp16.400-Rp16.450, dengan potensi support di Rp16.300," ujar dia.

Selain itu, Kebijakan Trump untuk menghenakan perang di Ukraina dan membina hubungan baik dengan China tentunya akan menjadi sentimen positif untuk pasar risk asset. Namun di sisi lain,

ada yang lebih dikhawatirkan pasar, yaitu perang dagang karena dipicu kenaikan tarif Trump.

"Jadi ke depan, kita akan melihat bagaimana kebijakan tarif Trump akan diterapkan dan reaksi dari negara-negara yang dinantikan tarifnya," kata Aris.

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari ini di Jakarta menguat 75 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.293 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.368 per dolar AS.

■ Danial

Ombudsman Siapkan Kajian Mendalam Terkait Pemanfaatan Ruang Laut

Jakarta, HanTer - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan bahwa institusinya tengah menyiapkan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang laut di Indonesia.

Hery menjelaskan bahwa, kajian tersebut dilakukan untuk menyikapi persoalan pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang, dan Bekasi.

"Di Banten, Bekasi, ini karena persoalan untuk kegiatan bisnis terkait kegiatan reklamasi yang berproyeksi kepada hunian. Namun, ini juga terjadi di Kepri (Kepulauan Riau) misalnya, ini juga terjadi di Kalimantan, Balikpapan, Sulawesi Tenggara, Bali, di NTB (Nusa Tenggara Barat), bahkan Papua," kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, dia memandang bahwa persoalan pemagaran laut yang terjadi dari Sabang sampai Merauke tersebut menandakan masih terdapatnya ego sektoral antarkementerian, sehingga koordinasi atau kolaborasi

belum tertata kelola dengan baik.

"Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu memperhatikan soal bagaimana pengurusan wilayah-wilayah perairan kita," ujarnya mengingatkan.

Sebelumnya, Presiden

Prabowo telah memerintahkan jajarannya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta pihak terkait untuk menyelidiki dan mengusut pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten, yang tidak mengantongi izin atau legal.

"Arahan Presiden, satu,

selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara," kata Trenggono saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

■ Sammy

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.

Jakarta, 22 Januari 2025
EMITEN WIKI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.

Jakarta, 22 Januari 2025
EMITEN WIKI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.

Jakarta, 22 Januari 2025
EMITEN WIKI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
WALI AMANAT BANK MEGA PT BANK MEGA TBK